



## Dewan Setujui APBD-P Rp8,8 T

**PEKANBARU (RP)** - DPRD Provinsi Riau menyetujui RAPBD Perubahan Rp8.848.006.791.337.30 dalam rapat paripurna, Selasa (19/8). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Riau Drs Johar Firdaus MSi. Hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur Riau H Annas Maamun dan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Dalam rapat paripurna tersebut juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau Gumpita menyebutkan APBD Provinsi Riau 2014 sebesar Rp8.276.751.343.278,13. Disebutkannya, dalam rapat paripurna tersebut pendapatan daerah dalam APBD 2014 sebesar Rp7.126.649.001.186,-18 sementara dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.400.330.378.005,43.

Banggar Provinsi Riau mengatakan, kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2014 lebih kurang Rp273,6 miliar atau 3,84 persen dari anggaran sebelum perubahan lebih kurang sebesar Rp7,1 triliun menjadi lebih kurang Rp7,4 triliun pada APBD Perubahan tahun 2014.

Banggar mengatakan ini merupakan indikasi kurang beraninya pemerintah daerah menetapkan target pendapatan daerah yang lebih tinggi sehingga berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan target pendapatan daerah pada APBD-P

tahun 2014 lebih kurang Rp273,6 miliar atau 3,84 persen dari anggaran pendapatan daerah sebelum perubahan. Ini merupakan kontribusi kenaikan target penerimaan daerah dari komponen PAD sebesar Rp106,9 miliar. Atau Rp3,76 miliar dan peningkatan target penerimaan dari dana perimbangan sebesar Rp166,7 miliar atau 4,58 persen dari anggaran sebelum perubahan.

Gumpita menyampaikan bahwa perubahan anggaran belanja daerah Provinsi Riau dari belanja tidak langsung dalam APBD Murni 2014 sebesar Rp3.740.619.202.740. Sementara dalam APBD Perubahan menjadi 3.890.815.228.938. Belanja langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai dalam APBD murni Rp976.393.701.156. Sementara dalam APBD-P menjadi Rp1.071.827.896.025.

Belanja subsidi tetap yaitu Rp5 miliar. Belanja hibah dalam APBD murni Rp1.038.882.030.000 sementara dalam APBD Perubahan menjadi Rp1.007.622.675.500.

Belanja bantuan sosial dalam APBD murni sebesar Rp17.427.500.000. Sementara dalam APBD-P menjadi Rp22.178.500.000

Belanja bagi hasil kepada Provinsi Riau/kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam APBD murni sebesar Rp1.023.499.607.779 sementara dalam APBD-P menjadi Rp1.536.862.614.788. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dari APBD murni sebesar Rp674.413.913.400 dalam APBD-P menjadi Rp162.-

321.093.125 atau berkurang 75 persen.

Belanja tidak terduga dari APBD murni menjadi APBD-P tetap sebesar Rp5.002.450.000. Belanja langsung dalam APBD murni Rp4.536.132.140.538 dalam APBD-P menjadi Rp4.967.191.562.399 terdiri dari belanja pegawai dalam APBD murni Rp258.019.771.120 dalam APBD-P menjadi Rp271.143.777.660.

Belanja barang dan jasa dalam APBD Murni Rp2.547.656.063.401 sementara dalam APBD-P menjadi Rp2.785.481.192.776. Belanja modal dalam APBD murni Rp1.730.456.306.017 sementara dalam APBD Perubahan menjadi 1.910.566.591.963.

Dengan demikian maka jumlah belanja APBD Murni 2014 Rp8.276.751.343.278 dan menjadi Rp8.848.006.791.337. Pada perubahan APBD 2014, pemerintah daerah menetapkan kebijakan menaikkan anggaran belanja daerah lebih kurang Rp571,2 miliar atau 6,90 persen dari anggaran sebelumnya.

Gumpita mengatakan Banggar berharap Pemprov Riau mengoptimalkan pendapatan daerah dengan meningkatkan pelayanan wajib pajak dan pelayanan pajak. Belanja hibah harus selektif dan tepat sasaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Serapan pelaksanaan APBD 2014 harus ditingkatkan. Saat ini masih jauh dari semestinya. Dari waktu seharusnya sudah 70 persen," kata Gumpita menyampaikan saran Banggar kepada Pemerintah Provinsi Riau. (rul)